LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN RSUD WARU PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR IS	I						3
LAPORAN A	AUDITOR INDE	EPENDEN .					1
LAPORAN	KEUANGAN	RUMAH	SAKIT	UMUM	DAERAH	WARU	
PAMEKASA	AN TA 2022 <i>AUI</i>	DITED					



Kantor Jalan Gunung Anyar Tambak IV Kav.C, No. 17 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Kode Pos 60294

(031) 87858590 +6281332591984

M harsya.why14@gmail.com

Izin Usaha KAP Menteri Keuangan No. 384/KM.1/2018

Nomor: 000026/2.1217/AU.5/11/1534-1/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru di Pamekasan

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan, yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2022 serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab RSUD Waru Pamekasan atas Laporan Keuangan

RSUD Waru Pamekasan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2017, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggungjawab Auditor

Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2017. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan Dalam melakukan risiko maupun kesalahan. penilaian tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan per 31 Desember 2022, serta Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan perundangundangan, kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami Nomor 24/LHP-KUU-SPI/KAP-WH.2.1217/03/2023 Tanggal 27 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Hal Lain

Laporan Keuangan RSUD Waru, Kabupaten Pamekasan Per 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap Laporan Keuangan Per 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor lain.

Surabaya, 27 Maret 2023 KANTOR AKUNTAN PUBLIK WAWAN HERMANSYAH,

Of Control of Control

Wawan Hermansyah, S.E., M.A., CMA., CPA., ASEAN CPA NRAP AP. 1534

LAPORAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN ANGGARAN 2022

AUDITED

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFT.	AR ISI	i
DAFT.	AR TABEL	ii
LAPO	RAN KEUANGAN	1
1	Laporan Realisasi Anggaran	1
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
3	Neraca	3
4	Laporan Operasional	4
5	Laporan Arus Kas	5
5	Laporan Perubahan Ekuitas	6
5	Catatan atas Laporan Keuangan	7

DAFTAR TABEL

	Halam	an
Tabel 1	Penyisihan Umur Piutang Lainnya	12
Tabel 2	Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan	25
Tabel 3	Rincian Belanja Tahun 2022	25
Tabel 4	Rincian Belanja Operasi	26
Tabel 5	Rincian Belanja Pegawai	26
Tabel 6	Rincian Belanja Barang Tahun 2022	26
Tabel 7	Belanja Modal	28
Tabel 8	Mutasi Kas	29
Tabel 9	Piutang dari Kegiatan Operasioanl BLUD	30
Tabel 10	Persediaan	30
Tabel 11	Aset Tetap	30
Tabel 12	Aset Tetap	30
Tabel 13	Aset Tetap Tanah	31
Tabel 14	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31
Tabel 15	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	32
Tabel 16	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
Tabel 17	Aset Tetap Lainnya	33
Tabel 18	Akumulasi Penyusutan	34
Tabel 19	Aset Lainnya	34
Tabel 20	Aset Tak Berwujud	34
Tabel 21	Akumulasi dan Amortisasi	35
Tabel 22	Kewajiban Jangka Pendek	35
Tabel 23	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	35
Tabel 24	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	36
Tabel 25	Beban LO	37
Tabel 26	Beban Pegawai	37
Tabel 27	Beban Persediaan	37
Tabel 28	Beban Jasa	38
Tabel 29	Beban Pemeliharaan	38
Tabel 30	Beban Perjalanan Dinas	39
Tabel 31	Beban Perjalanan Penyusutan	39
Tabel 32	Beban Surplus/Defisit LO	39
Tabel 33	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	40
Tabel 34	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	40
Tabel 35	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	41



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN **RSUD WARU**

Jalan Raya Waru Pasean Pamekasan 69353 Tellepon: (0324) 510501, IGD: (0324) 510567 E-mail: rsudwaru.pamekasan@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKTUR

TENTANG

TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: dr. Nanang Suyanto, M.Si

NIP

: 19691105 200212 1 002

Alamat Kantor : Jl. Waru Pasean, Pamekasan

Jabatan

: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan Tahun Anggaran 2022;

2. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SPAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) No. 1 Tahun 2017 dan ketentuan lain yang relevan;

3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan RSUD Waru Pamekasan Tahun Anggaran 2022 telah dimuat secara lengkap dan benar;

4. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan Tahun Anggaran 2022 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

5. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanggungjawab.

Maret 2023 Pamekasan, DIREKTUR, RU PAMEKASAN, Suyanto, M.Si 1105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

			202	22		2021
NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	PENDAPATAN	5.1.9				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.9				
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.1.9, a.1	5.363.423.000,00	3.843.907.221,08	71,67%	1.754.804.804,00
5	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.9, a.1	16.675.826.874,00	14.654.474.553,41	0,00	10.226.888.088,35
6	JUMLAH PENDAPATAN		22.039.249.874,00	18.498.381.774,49		11.981.692.892,35
7	BELANJA	5.1.10				
8	BELANJA OPERASI	5.1.10				
9	Belanja Pegawai	5.1.10, b.1.1.	5.557.481.532,00	5.298.651.663,00	95,34%	5.085.983.039,00
10	Belanja Barang	5.1.10, b.1.2	6.375.771.498,00	5.545.532.328,41	86,98%	4.189.002.456,44
11	JUMLAH BELANJA OPERASI		11.933.253.030,00	10.844.183.991,41	90,87%	9.274.985.495,44
12	BELANJA MODAL	5.1.10, b.2.				
13	Belanja Tanah	5.1.10, b.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.10, b.2.	4.509.521.896,00	4.428.530.559,00	98,20%	2.636.147.129,91
15	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.10, b.2.	182.131.948,00	62.580.000,00	34,36%	69.600.000,00
16	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.10, b.2.	50.920.000,00	0,00	0,00%	0,00
17	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.10, b.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	JUMLAH BELANJA MODAL		4.742.573.844,00	4.491.110.559,00	94,70%	2.705.747.129,91
19	JUMLAH BELANJA		16.675.826.874,00	15.335.294.550,41	91,96%	11.980.732.625,35
20	SURPLUS/(DEFISIT)	5.3.1.C	5.363.423.000,00	3.163.087.224,08	58,98%	960.267,00

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	960.267,00	3.405.663.986,02
3	Subtotal (1-2)		-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	3.163.087.224,08	960.267,00
5	Subtotal (3+4)	3.163.087.224,08	960.267,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya		-
7	Lain-Lain		-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	3.163.087.224,08	960.267,00

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

NERACA PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2022	2021
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
5	Kas di Bendahara Penerimaan	1, a.1.	2.084.521,00	960.267,00
6	Kas di BLUD	1, a.2.	3.161.002.703,08	0,00
17	Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD	3, a.3.	593.879.887,00	375.664.300,00
20	Persediaan	4, a.4.	984.301.412,49	1.254.098.402,98
	Jumlah Aset Lancar		4.741.268.523,57	1.630.722.969,98
1	ASET TETAP	6		
2	Tanah	6, b.1.	455.450.000,00	455.450.000,00
3	Peralatan & Mesin	6, b.2.	33.206.579.253,52	28.779.831.794,52
4	Gedung & Bangunan	6, b.3.	31.919.334.000,00	31.698.730.000,00
5	Jalan, Irigrasi & Jaringan	6, b.4.	1.234.508.000,00	1.234.508.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	6, b.5.	163.487.100,00	163.487.100,00
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6, b.6.	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan	6, b.7.	(32.048.051.678,00)	(26.425.367.577,00)
	Jumlah Aset Tetap		34.931.306.675,52	35.906.639.317,52
1	ASET LAINNYA	7, b.5.		
6	Aset Tidak Berwujud	7	99.437.500,00	99.437.500,00
7	Aset Lain-lain	7	41.520.083,00	0,00
8	Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	7, b.7.	(82.437.500,00)	(65.437.500,00)
9	Jumlah Aset Lainnya		58.520.083,00	34.000.000,00
10	JUMLAH ASET		39.731.095.282,09	37.571.362.287,50
11	KEWAJIBAN	5.1.5		
12	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1.5, d.1.		
16	Utang Belanja	5.1.5, d.1.	850.476.255,00	0,00
17	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.5, d.1.	0,00	94.875.198,00
18	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		850.476.255,00	94.875.198,00
19	EKUITAS			
20	EKUITAS	5.1.6		
21	Ekuitas	5.1.6. e.1.	38.880.619.027,09	37.476.487.089,50
22	JUMLAH EKUITAS		38.880.619.027,09	37.476.487.089,50
23	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		39.731.095.282,09	37.571.362.287,50

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP: 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2022	2021
	KEGIATAN OPERASIONAL			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.7	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.7, a.1.	4.062.122.808,08	1.754.804.804,00
6	Jumlah PAD		4.062.122.808,08	1.744.282.304,00
7	PENDAPATAN HIBAH			
8	Pendapatan Hibah		0,00	25.000.000,00
9	Jumlah Pendapatan Hibah		0,00	25.000.000,00
10	Jumlah Pendapatan Hibah		4.062.122.808,08	1.769.282.304,00
11	BEBAN	5.1.8		
12	Beban Pegawai	5.1.8, b.1.	5.501.694.347,56	5.085.983.039,00
13	Beban Persediaan	5.1.8, b.2.	2.485.741.515,90	1.427.657.857,46
14	Beban Jasa	5.1.8, b.3.	3.417.592.592,44	2.447.082.326,00
15	Beban Pemeliharaan	5.1.8, b.4.	219.731.000,00	138.349.180,00
16	Beban Perjalanan Dinas	5.1.8, b.5.	40.678.500,00	45.684.901,00
19	Beban Penyusutan	5.1.8, b.6.	5.639.684.101,00	5.812.487.919,00
20	Beban Lain-lain	5.1.8, b.7.	6.383.100,00	798.539,46
21	JUMLAH BEBAN		17.311.505.156,90	14.958.043.761,92
22	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(13.249.382.348,82)	(13.188.761.457,92)
23	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
24	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non	1	0,00	318.286.237,00
	Operasional Lainnya			
25	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI		0,00	318.286.237,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL		(40.040.000.040.00)	(40.070.475.000.00)
26	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.3.3.C	(13.249.382.348,82)	(12.870.475.220,92)

Pamekasan, 27 Maret 2023
DIREKTUR RSUD WARU
KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si

Pembina (IV/a) NIP: 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	(dalam rupiah) 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional	2022	2021
2	Arus Masuk Kas		
4	Pendapatan Hibah		
5	Pendapatan hasil Kerjasama		
6	Pendapatan APBD	14.654.474.553,41	10.226.888.088,35
7	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah		
8	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 7)	18.498.381.774,49	11.981.692.892,35
9	Arus Keluar Kas	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
10	Pembayaran Pegawai	5.298.651.663,00	5.085.983.039,00
11	Pembayaran Barang Jasa	5.545.532.328,41	4.189.002.456,44
12	Pembayaran Bunga		·
13	Pembayaran Lain-Lain		
14	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d. 13)	10.844.183.991,41	9.274.985.495,44
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8-14)	7.654.197.783,08	2.706.707.396,91
27	Arus Keluar Kas		
28	Perolehan atas Tanah		
29	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	4.428.530.559,00	2.636.147.129,91
30	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	62.580.000,00	69.600.000,00
31	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
36	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d. 35)	4.491.110.559,00	2.705.747.129,91
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26-36)	(4.491.110.559,00)	(2.705.747.129,91)
56	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	3.163.087.224,08	960.267,00
57	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	-	6.034.839.327,49
58	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (56+57)	3.163.087.224,08	6.035.799.594,49

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si Pembina (IV/a) NIP: 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

				(Balaiii Hapiaii)
No.	Uraian	Ref	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	5.3.4.A	37.476.487.089,50	40.126.910.846,07
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.3.4.B	(13.249.382.348,82)	(12.870.475.220,92)
	Koreksi Nilai Persediaan	5.3.4.C.1	0,00	0,00
	Koreksi Saldo Awal Piutang	5.3.4.C.2	0,00	0,00
	Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak tertagih	5.3.4.C.3	0,00	0,00
	Koreksi saldo awal investasi permanen-Penyertaan Modal	5.3.4.C.4	0,00	0,00
	Koreksi saldo awal Aset Tetap	5.3.4.C.5	0,00	0,00
	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	5.3.4.C.6	0,00	(5.000.000,00)
	R/K PPKD	5.3.4.C.11	14.653.514.286,41	10.225.051.464,35
4	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	5.3.4.D	1.404.131.937,59	(2.650.423.756,57)
5	EKUITAS AKHIR	5.3.4.E	38.880.619.027,09	37.476.487.089,50

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si

Pembina (IV/a) NIP : 19691105 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 DAN 2021

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Waru

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waru dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. menilai kondisi keuangan. menilai efektifitas dan efisiensi Rumah Sakit Umum Daerah Waru. dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Rumah Sakit Umum Daerah Waru sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode akuntansi.

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru tahun 2022 memiliki beberapa peranan. antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan Rumah Sakit Umum Daerah Waru oleh masyarakat (DPRD) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (user) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Waru dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan. pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset. kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Waru dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah untuk menyediakan informasi tentang :

- a) Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Waru dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
- b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Waru berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- c) Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waru
- d) Kewajiban-kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Waru kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
- e) Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Waru pada tanggal neraca.
- f) Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA. Belanja. Aset. Kewajiban. Ekuitas. Pendapatan LO dan Beban.

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru adalah:

- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:
- 10. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pamekasan;
- 11. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pamekasan.

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD, maka penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru disusun dengan sistematika sebagai berikut.

5.1. Pendahuluan

- 5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru
- 5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru
- 5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru

- 5.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 5.2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja Keuangan
 - 5.2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru
 - 5.3.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.3.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.7. Pengungkapan atas pos pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- 5.4. Penjelasan dan Informasi Non Keuangan
- 5.5. Penutup

5.1.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pengakuan

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah meliputi:
 - 1) Rekening Kas Umum Daerah adalah saldo simpanan di bank yang ditunjuk yang digunakan untuk menerima semua pendapatan daerah dan membiayai semua pengeluaran/kegiatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
 - 2) Rekening Dana Titipan dan *Revolving* adalah saldo simpanan di bank yang ditunjuk yang digunakan untuk menampung pembayaran dana bergulir atau dana titipan lainnya. Apabila terdapat dana titipan yang belum jelas status kepemilikannya maka akan dicatat sebagai Kas yang dibatasi penggunaanya.
 - Deposito Berjangka waktu satu bulan pada bank yang ditunjuk yang dapat dicairkan sewaktu-waktu kurang dari satu bulan atau dapat diperpanjang secara otomatis.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai yang berada di bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran.
- c. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dari penerimaan pendapatan asli daerah yang belum disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah.
- d. Kas di BLUD meliputi:
 - 1) Rekening BLUD yang dimiliki oleh OPD/unit OPD Badan Layanan Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk;
 - 2) Kas di Bendahara BLUD;

- 3) Deposito Berjangka satu bulan yang dimiliki BLUD; dan
- 4) Semua rekening giro yang digunakan sebagai rekening penampungan oleh BLUD.
- e. Kas di FKTP meliputi:
 - 1) Rekening FKTP yang dimiliki oleh Puskesmas pada bank yang ditunjuk.
 - 2) Kas di Bendahara FKTP adalah uang tunai yang berada pada Bendahara FKTP.
- f. Kas BOS meliputi:
 - 1) Rekening BOS yang dimiliki oleh sekolah negeri pada bank yang ditunjuk.
 - 2) Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai yang berada pada bendahara pengeluaran BOS.
- g. Kas Lainnya meliputi:
 - 1) Saldo simpanan yang berada pada rekening penampungan yang ditunjuk;
 - 2) Penerimaan jasa giro pada semua rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah; dan
 - 3) Uang tunai atau saldo simpanan yang belum dibayarkan untuk pihak ketiga.
- h. Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang tunai atau saldo simpanan bank yang belum dapat ditentukan status kepemilikannya, apakah menjadi hak pemerintah atau bukan.

Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari tiga bulan tanggal perolehannya. Setara kas terdiri dari:

- a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya,
- b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek.
- b. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada

- nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek.
- c. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dikategorikan meliputi:

- a. Piutang pada Asset Lancar yaitu dimana piutang yang jatuh temponya kurang atau sampai dengan satu tahun ke depan pada saat penyusunan laporan keuangan, maka pengakuannya dan penyajiannya tetap diakui sebagai asset lancar. Adapun piutang pada Asset Lancar terdiri dari:
 - Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - 2) Piutang Retribusi Daerah timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaiman tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
 - 3) Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagi akibat dari peraturan perundangundangan.
 - 4) Beban/Sewa Dibayar Dimuka.
 - 5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
 - 6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.
 - 7) Piutang Lainnya.
- b. Piutang pada asset non lancar pada Asset Lainnya yaitu piutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun ke depan pada saat penyusunan laporan keuangan, maka pengakuan dan penyajian diakui sebagai Asset Lainnya. Piutang yang merupakan asset non lancar terdiri dari:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 3) Tagihan Jangka Panjang;
 - 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
 - 5) Aset Lain-lain-sewa dibayar dimuka.

Pengakuan

Piutang diakui saat:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

- a. Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
- b. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value/NRV).

Penyajian Piutang

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (aging schedule). Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penyisihan umur piutang ditetapkan sebagi berikut:

Tabel 1 Penyisihan Umur Piutang Lainnya

Kategori	Umur Piutang yang Lainnya	Prosentase Penyisihan
Lancar	Belum Jatuh Tempo	0%
Kurang Lancar	Menunggak 1 s/d. 2 tahun sejak jatuh tempo	10%
Diragukan	Menunggak Lebih dari 2 s/d.3 tahun sejak jatuh tempo	50%
Macet	Menunggak lebih dari 3 tahun	100%

4. Persediaan

Persediaan meliputi:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.
- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out)

5. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya yaitu:

- a. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- b. Investasi non permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan (kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk mempejualbelikan atau menarik kembali).

Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran Investasi

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut di atas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

b. Metode ekuitas

Pada metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pemilihan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- b. Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

6. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (selanjutnya akan diakui sebagai asset tetap) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual:
- 3) Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan untuk pembelian/perolehan untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk per unit bangunan, jalan, jaringan dan irigasi sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.

b. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi diperoleh dari perbandingan antara belanja yang dikeluarkan dengan nilai aset yang bersangkutan. Apabila hasil perhitungan lebih kecil daripada tarif penyusutan pertahun, maka pengeluaran tersebut dibebankan sebagai belanja pemeliharaan di penganggaran, serta tidak menambah nilai aset. Sedangkan apabila hasil perhitungan lebih besar dari tarif penyusutan pertahun, maka pengeluaran tersebut diakui sebagai belanja modal yang pada akhirnya akan menambah nilai aset (dikapitalisasi).

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah metode garis lurus.

Penyusutan per periode =Nilai yang dapat disusutkan : Masa manfaat

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan

Masa manfaat asset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab Pamekasan.

Untuk menentukan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh sebelum pemberlakuan kebijakan akuntansi ini, maka pemerintah daerah menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh atau dua belas bulan.

Penerapan penyusutan aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai diterapkan pada tahun anggaran 2015.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Perhitungan penyusutan apabila ada kapitalisasi biaya yang timbul setelah perolehan Aset Tetap:

- a. Pemeliharaan aset tetap yang menambah umur manfaat lebih dari umur manfaat yang diatur kebijakan akuntansi, maka umur manfaat aset tersebut diakui sesuai umur manfaat maksimal yang telah diatur dalam kebijakan akuntansi.
- b. Apabila aset tetap yang nilai bukunya sudah nol kemudian ada pemeliharaan atas aset tersebut, maka aset tersebut akan dicatat menambah nilai aset yang nol, dengan perhitungan penyusutan aset berdasarkan nilai perolehan awalnya.
- c. Apabila ada penambahan pemeliharaan aset tetap lebih dari satu kali maka nilai penyusutan dihitung berdasarkan nilai perolehan awalnya.
- d. Apabila dilakukan penilaian aset kembali, maka perhitungan penyusutan aset berdasarkan nilai buku dan umur ekonomis yang ditetapkan oleh tim penilai aset atau ditetapkan dengan Surat Keputusan.

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.

Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Softwarekomputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e. Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Aset Tak Berwujud

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a. Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
- b. Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga meliputi:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan, adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- b. Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- c. Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- e. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- f. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Pengakuan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- f. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

Pengukuran Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai

bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Definisi Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengakuan Aset Lain-lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

5.1.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

2. Klasifikasi kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Bunga;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b. Pendapatan Diterima Dimuka;
- c. Utang Beban; dan
- d. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a. Utang Dalam Negeri;
- b. Utang Luar Negeri; dan

c. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan; dan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

4. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5.1.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

5.1.7 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. PengakuanPendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (a) Timbulnya hak atas pendapatan;
- (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Ekuitas diakui pada akhir periode akuntansi.

3. Pengukuran Pendapatan-LO

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. Klasifikasi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan yang sah.

5.1.8 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

(a) Timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

(b) Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

3. Pengukuran Beban

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan.

a. Klasifikasi Beban

Beban LO pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan diklasifikasi dan disajikan sebagai berikut:

- 1) Beban Pegawai terdiri dari:
 - a) Gaji dan Tunjangan;
 - b) Tambahan Penghasilan PNS;
 - c) Honorarium PNS;
 - d) Honorarium Non PNS;
 - e) Beban Pegawai BLUD;
 - f) Beban Pegawai dari Dana Lainnya.
- 2) Beban Persediaan terdiri dari:
 - a) Beban ATK;
 - b) Beban Persediaan Dokumen;
 - c) Beban Alat Listrik;

- d) Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya;
- e) Beban Alat Kebersihan;
- f) Beban Bahan Bakar Minyak;
- g) Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas;
- h) Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- i) Beban Tabung Gas;
- j) Beban Dokumentasi;
- k) Beban Cindermata, Souvenir, Vandel, Piala dll;
- 1) Beban Alat Kesehatan;
- m) Beban Bahan Bangunan;
- n) Beban Bibit Tanaman;
- o) Beban Bibit Ternak;
- p) Beban Bahan Obat-obatan;
- q) Beban Bahan Kimia;
- r) Beban Bahan Praktek Percontohan;
- s) Beban Bahan Laboratorium;
- t) Beban Pakan Ternak;
- u) Beban Bahan Sarana Produksi Pertanian:
- v) Beban Bahan Alat Kedokteran;
- w) Beban Suku Cadang Alat Kesehatan;
- x) Beban Bahan Makanan;
- y) Beban Barang Cetak;
- z) Beban Penggandaan;
- aa) Beban Makanan dan Minuman;
- bb) Beban Pakaian:
- cc) Beban Persediaan Dari Dana Lainnya.
- 3) Beban Jasa terdiri dari:
 - a) Beban Sewa Diterima Dimuka;
 - b) Beban Dekorasi;
 - c) Beban Publikasi;
 - d) Beban Telepon;
 - e) Beban Air;
 - f) Beban Listrik;
 - g) Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang;
 - h) Beban Surat Kabar/Majalah;
 - i) Beban Kawat/Faksimili/Internet;
 - j) Beban Paket/Pengiriman;
 - k) Beban Sertifikasi;
 - 1) Beban Jasa Kerja;
 - m) Beban Jasa Administrasipemungutan Pbb;
 - n) Beban Jasa Pelayanan Medis;
 - o) Beban Jasa Perbaikan Peralatan Gedung/Kantor;
 - p) Beban Jasa Pelayanan Parkir;
 - q) Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;
 - r) Beban Jasa Pemeliharaan Ac;
 - s) Beban Jasa Penelitian/Litbang;
 - t) Beban Premi Asuransi Kesehatan;
 - u) Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah;
 - v) Beban Jasa Dari Dana Lainnya.

- 4) Beban Pemeliharaan terdiri dari:
 - a) Beban Pemeliharaan Jalan;
 - b) Beban Pemeliharaan Gedung kantor;
 - c) Beban Pemeliharaan Rumah Dinas;
 - d) Beban Pemeliharaan Irigasi/Sungai;
 - e) Beban Pemeliharaan Jembatan;
 - f) Beban Pemeliharaan Fasilitas Umum;
 - g) Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran;
 - h) Beban KIR;
 - i) Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - j) Beban Pemeliharaan Dana dari Lainnya.
- 5) Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a) Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b) Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c) Beban Beasiswa Tugas Belajar S2;
 - d) Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan;
 - e) Beban Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis;
 - f) Beban Perjalanan Dinas dari Dana Lainnya.
- 6) Beban Hibah terdiri dari:
 - a) Beban Hibah kepada Instansi Pemerintah;
 - b) Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi;
 - c) Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - d) Beban Aset Tetap yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - e) Beban Aset Lainnya yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
- 7) Beban Penyusutan terdiri dari:
 - a) Beban Penyusutan Aset Tetap;
 - b) Beban Penyusutan Aset Lain-Lain (Aset Rusak);
 - c) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- 8) Beban Transfer terdiri dari:
 - a) Beban Transfer Bagi Hasil;
 - b) Beban Transfer Bantuan Keuangan.
- 9) Beban Lain-lain terdiri dari:
 - a) Beban Penyisihan Piutang;
 - b) Beban Penyisihan Kerugian;
 - c) Beban atas Perolehan Aset *Ekstrakomptabel*;
 - d) Beban atas Bagian Rugi BUMD (metode ekuitas).

5.1.9 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1. Definisi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui dalam periode berjalan, pengakuan pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima.

Pencatatan Pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas (umum).

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

5.1.10 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi Belanja

Semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Pengakuan Belanja

Belanja diakui dalam periode berjalan, saat terjadinya pengeluaran. Pengakuan belanja non modal/investasi dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Sedangkan belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (pemegang kas).

Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Pengukuran Belanja

Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.

5.1.12 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

3. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Pengukuran penerimaan pembiayaan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

5. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

6. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

7. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

7.1.13 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara lengkap kebijakan akuntansi sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021.

Apabila ada sesuatu hal/kejadian/kondisi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi yang ada pada Pemkab Pamekasan, maka perlakuan akuntansi akan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atau aturan pemerintah lain yang berlaku dan terkait akan hal tersebut.

5.2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

5.2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Waru Tahun Anggaran 2022 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut tampak dari realisasi pendapatan yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.754.804.804,00 meningkat menjadi Rp3.843.907.221,08 atau terjadi peningkatan sebesar Rp2.089.102.417,08 dari tahun sebelumnya.

Dari sisi belanja pada Tahun Anggaran 2022 menunjukkan penghematan sebesar 22,39% yaitu anggaran sebesar Rp16.675.826.874,00 terealisasi sebesar Rp15.335.294.550,41 atau terdapat sisa belanja sebesar Rp1340.53232359.

5.2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain adalah:

- 1. Selalu berubahnya peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan para pengelola keuangan perlu waktu untuk menyesuaikan dengan dengan peraturan perundangan tersebut khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami tentang pengelolaan keuangan khususnya yang berlatar pendidikan bidang akuntansi;
- 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah; dan
- 4. Kurangnya dokter spesialis pada RSUD Waru Pamekasan.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.3.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

A PENDAPATAN

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
A.1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.363.423.000,00	3.843.907.221,08	1.754.804.804,00

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat RSUD Waru pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.843.907.221,08 atau sebesar 43,87% dari anggaran pendapatan sebesar Rp5.363.423.000,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp2.089.102.417,08 atau sebesar 20,41%. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat RSUD Waru merupakan pendapatan retribusi jasa umum yang berasal jasa pelayanan kesehatan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan

No	Uraian Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pendapatan pajak daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.363.423.000,00	3.843.907.221,08	1.754.804.804,00
3	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
	Total	5.363.423.000,00	3.843.907.221,08	1.754.804.804,00

		Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	$(\mathbf{R}\mathbf{p})$	(Rp)
B.	BELANJA	16.675.826.874,00	15.335.294.550,41	11.980.732.625,35

Belanja RSUD Waru pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.335.294.550,41 atau sebesar 91,96% dari total anggaran belanja sebesar Rp16.675.826.874,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja mengalami penghematan sebesar Rp1. 340. 532.323, 59 atau 8% dari anggaran. Belanja RSUD Waru terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, berikut rinciannya:

Tabel 3. Rincian Belanja Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
B.1	Belanja Operasi	11.933.253.030,00	10.844.183.991,41	9.274.985.495,44
B.2	Belanja Modal	4.742.573.844,00	4.491.110.559,00	2.705.747.129,91
	Jumlah	16.675.826.874,00	15.335.294.550,41	11.980.732.625,35

		Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA
		(Rp)	(Rp)	2021 (Rp)
B.1	Belanja Operasi	11.933.253.030,00	10.844.183.991,41	9.274.985.495,44

Belanja operasi RSUD Waru tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.844.183.991,41 atau sebesar 90,87% dari total anggaran belanja operasi sebesar Rp11.933.253.030,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.569.198.495,97 atau 9,23% dari anggaran. Belanja operasi RSUD waru terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, berikut rinciannya:

Tabel 4. Rincian Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.557.481.532,00	5.298.651.663,00	5.085.983.039,00
2	Belanja Barang	6.375.771.498,00	5.545.532.328,41	4.189.002.456,44
	Jumlah	11.933.253.030,00	10.844.183.991,41	9.274.985.495,44

B.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegwai RSUD Waru tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.298.651.663,00 atau sebesar 95,34% dari total anggaran belanja pegawai sebesar Rp5.557.481.532,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp212.668.624,00 atau sebesar 4,01% dari anggaran, berikut rincian belanja pegawai:

Tabel 5. Rincian Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	4.805.481.532,00	4,692,856,764.00	4.542.586.746,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif ASN	132.000.000,00	129.681.541,00	154.583.131,00
3	Honorarium PNS	0,00	0.00	3.600.000,00
4	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
5	Jasa pelayanan PNS	620.000.000,00	476.113.787,00	385.213.162,00
	Jumlah	5.557.481.532,00	5.298.651.663,00	5.085.983.039,00

B.1.2 Belanja Barang

Belanja barang RSUD Waru tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.545.532.328,41 atau sebesar 86,97% dari total anggaran belanja barang sebesar Rp6.375.771.498,00. Apabila dibandingan dengan tahun 2021, realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar Rp1.356.529.871,97 atau 24,24% dari anggaran, berikut rincian belanja barang:

Tabel 6. Rincian Belanja Barang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	0,00	105.000.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	24.000.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	68.382.700,00	51.371.000,00	41.509.600,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	44.242.000,00	44.150.000,00	87.285.000,00

5		1,096,814,553.00	1,089,329,259.00	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	663.422.747,64
6	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.119.000,00	1.797.500,00	3.356.400,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,968,961.00	8,713,000.00	29.506.050,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	100.000.000,00	90.297.100,00	80.129.200,00
10	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,370,000.00	23,750,000.00	0,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19,764,000.00	19,468,000.00	2.768.500,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untukKegiatan Kantor Lainnya	26,981,248.00	23,345,400.00	0,00
13	Belanja Publikasi	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Peralatan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
15	Pakai Habis Belanja Obat-Obatan-Obat	1.100.000.000,00	719.720.418,41	544.494.520,80
16	Belanja Obat-Obatan-Obat Belanja Makanan dan			
17	Minuman Rapat Belanja Makanan dan	37.826.000,00	28.025.000,00	4.600.000,00
18	Minuman Jamuan Tamu Belanja Makanan dan	825.000,00	0,00	0,00
	Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	157.911.036,00	137.593.705,00	94.142.007,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.612.000.000,00	1.601.000.000,00	1.389.500.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.800.000,00	1.756.000,00	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	339.600.000,00	323.600.000,00	234.600.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	126,000,000.00	100,000,000.00	75.400.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	126.000.000,00	126.000.000,00	75.600.000,00
25	Belanja Jasa Kalibrasi	67.819.335,00	60.102.000,00	42.300.000,00
26	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	114.200.000,00	110.488.950,00	65.757.900,0
27	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.000.000,00	8.483.594,00	14.521.150,0
28	Belanja Tagihan Telepon	10.800.000,00	1.185.331,00	1.125.550,0
29	Belanja Tagihan Listrik	281.268.520,00	273.617.400,00	265.841.900,0
30	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00	1.800.000,00	1.800.000,0
31	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.000.000,00	20.901.280,00	32.085.412,00
32	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Gedung/Kantor	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.400.000,00	5.140.000,00	5.640.000,00
35	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.000.000,00	7.250.000,00	5.425.400,00
36	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,0
37	Lainnya Belanja Sewa Hotel	8.000.000,00	1.930.000,00	0,00
38	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00
39	Hukum Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekarjaan Taknik Sinil Air	0,00	0,00	0,00
40	Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	0,00	0,00	0,0
41	Konstruksi Bangunan Gedung Belanja Insentif bagi Pegawai	20,000,000.00	19,542,355.00	98.157.038,00

	Jumlah	6.375.771.498,00	5.545.532.328,41	4.189.002.456,44
56	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.484.000,00	28.834.500,00	14.960.901,00
55	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.125.000,00	7.000.000,00	820.000,00
	Biasa	31.816.000,00	4.844.000,00	14.464.000,00
54	Belanja Perjalanan Dinas			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
53	Belanja Bimbingan Teknis	37.500.000,00	37.500.000,00	15.440.000,0
52	Belanja kepesertaan	0.00	0.00	0,0
51	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	84.979.000,00	61.583.800,00	0,0
50	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	69.000.000,00,	47.423.000,00	23.867.000,0
49	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	19.800.000,0
48	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	100.000.000,00	96.000.000,00	0,0
47	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	1.500.000,0
46	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan- Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	53,001,665.00	38,449,500.00	34.800.000,0
45	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19,646,000.00	19,506,000.00	4.945.000,0
44	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih/Aat rumah tangga lainnya	0,00	0,00	41.475.980,0
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15,000,000.00	8,600,000.00	8.850.000,0
42	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10,000,000.00	6,217,500.00	3.111.200,0
	Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan			

		Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
B.2	Belanja Modal	4.742.573.844,00	4.491.110.559,00	2.705.747.129.91

Belanja modal RSUD Waru tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.491.110.559,00 atau sebesar 73,86% dari total anggaran belanja modal sebesar Rp4.742.573.844,00. Apabila dibandingan dengan tahun 2021. realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp1.785.363.429,09 atau sebesar 60,25%. berikut rincian belanja modal:

Tabel 7. Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.509.521.896,00	4.428.530.559,00	2.636.147.129,91
3	Belanja Modal Gedung dan	182.131.948,00	62.580.000,00	69.600.000,00

	Bangunan			
4	Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan	50.920.000,00	0.00	0.00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	4.742.573.844,00	4.491.110.559,00	2.705.747.129,91

		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
C.	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(11.312.403.874,00)	(11.491.387.329,33)	(10.225.927.821,35)

Surplus/(defisit) anggaran RSUD Waru tahun 2022 terealisasi sebesar Rp(11.491.387.329,33) atau sebesar 89,41% dari anggaran surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp. (11.312.403.874,00). Apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi surplus/(defisit) anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.459.507,98 atau 8,8%

5.3.2 Penjelasan Pos Neraca

A. Aset Lancar

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
A.1	Kas di BLUD	3.161.002.703,08	0.00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang masuk ke kas BLUD Rumah Sakit Daerah Waru per 31 Desember 2022.

- a. Tanggal 1 Januari s.d. 9 Februari 2022 Pendapatan Layanan BLUD disetor ke Kasda sebesar Rp51.563.459,00, hal ini karena RSUD Waru baru membuka rekening BLUD yang efektif per 10 Februari 2022;
- b. Sehingga penerimaan 10 Februari s.d. 31 Desember 2022 yang masuk rekening BLUD RSUD Waru sebesar Rp3.790.259.241,08, dengan rincian

Tabel 8. Mutasi Kas

Pendapatan Layanan BLUD Tahun 2022	Rp 3.843.907.221,08
Pendapatan BLUD masuk Kasda	Rp 51.563.459,00
Sub Jumlah	Rp 3.792.343.762,08
Pendapatan 31 Desember 2022	Rp 2.084.521,00
Jumlah Penerimaan	Rp 3.790.259.241,08

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(R p)	(Rp)
<i>A.2</i>	Kas di Bendahara Penerimaan	2.084.521,00	960.267,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan atas penerimaan 31 Desember 2022 yang disetorkan pada 4 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	Piutang dari Kegiatan	31 Des 2022	31 Des 2021
A.3	Operasional BLUD	(Rp)	(Rp)
		593.879.887,00	375.664.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD yang telah

didukung Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Piutang dari Kegiatan OperasioanI BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Agustus Tahap II	88.988.500,00
2	Agustus Tahap III	8.385.300,00
3	Agustus Tahap IV	6.249.300,00
4	September Tahap II	226.408.600,00
5	September Tahapan III	12.880.500,00
6	Oktober Tahap II	55.626.400,00
7	Desember	184.176.900,00
8	Ambulan Oktober dan November	2.760.000,00
9	Ambulan Desember	1.380.000,00
10	Obat Kronis	7.024.387,00
	Jumlah	593.879.887,00

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
A.16	Persediaan	984.301.412,49	1.254.098.402,98

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Persediaan

No	Urajan	31-Des-22	31-Des-21
INO	Olalali	(Rp)	(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	7.548.200,00	15.530.570,00
2	Alat Listrik	0	2.768.500,00
3	Perangko. Material Dan Benda pos lainnya	0	0
4	Alat Kebersihan	0	0
5	Obat-Obatan	436.341.463,99	475.875.380,44
6	Bahan Cetak	72.203.500,00	66.682.000,00
7	Barang Habis Pakai alat kesehatan	467.499.892,50	693.241.952,54
8	Makanan dan Minuman fasilitas pelayanan	1.041.656,00	0
0	pada urusan kesehatan	1.041.030,00	U
•	Jumlah	984.301.412,49	1.254.098.402,98

Per 31 Desember 2022 terdapat obat Kedaluwarsa sebesar Rp41.520.083,00 dengan rincian pada **Lampiran 1**.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
B.	Aset Tetap	34.771.935.155,52	35.906.639.317.52

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021.

Adapun Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 11. Aset Tetap

	145011117100110145		
No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	35.906.639.317,52	59.602.058.304,07
2	Mutasi Tambah tahun berjalan	4.491.110.559,00	2.800.347.129,91
3	Mutasi Kurang tahun berjalan	(10.983.100,00)	(70.398.539,46)
4	Akumulasi Penyusutan	(32.048.051.678,00)	(26.425.367.577,00)
	Saldo Akhir	34.931.306.675,52	35.906.639.317,52

Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 12. Aset Tetap

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Tanah	455.450.000,00	455.450.000,00

2	Peralatan dan Mesin	33.206.579.253,52	28,779,831,794.52
3	Gedung dan Bangunan	31.919.334.000,00	31.698.730.000,00
4	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	1.234.508.000,00	1,234,508,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	163.487.100,00	163.487.100,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(32.048.051.678.00)	(26.425.367.577,00)
	Jumlah	34.931.306.675,52	35.906.639.317,52

31 Des 2022	31 Des 2021
(Rp)	(Rp)
455.450.000.00	455.450.000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun mutasi Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 13. Aset Tetap Tanah

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
NO	Ofalan	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Awal	455.450.000.00	455.450.000.00
2	Mutasi Tambah tahun berjalan	0.00	0.00
	a. Realisasi Belanja Modal	0.00	0.00
	b. Hibah Masuk	0.00	0.00
	c. Mutasi Masuk	0.00	0.00
	d. Penilaian Tambah	0.00	0.00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan	0.00	0.00
	a. Mutasi Keluar	0.00	0.00
	b. Reklasifikasi Kurang	0.00	0.00
	c. Koreksi Pencatatan	0.00	0.00
·	Saldo Akhir	455.450.000.00	455.450.000.00

Penjelasan atas Mutasi Tanah sebagai berikut:

B.1

Tanah

B.1.2.a Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0.00 dan Rp 0.00 merupakan penambahan nilai tanah yang berasal dari realisasi belanja modal tanah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(R p)	(Rp)
<i>B.2</i>	Peralatan dan Mesin	33.206.579.253,52	28.779.831.794,52

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021sebagai berikut:

Tabel 14. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
INO	Olalali	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Awal	28.779.831.794,52	26.119.483.204,07
2	Mutasi Tambah tahun berjalan		
	a. Realisasi Belanja Modal	4.428.530.559,00	2.636.147.129,91
	b. Hibah Masuk	0,00	25.000.000,00
	c. Mutasi Masuk	4.600.000,00	0,00
	d. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
	e. Penilaian Tambah	0,00	0,00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan		
	a. Aset Ekstrakomptabel	6.383.100,00	798.539,46
	b. Penghapusan	0,00	0,00
	c. Hibah Keluar	0,00	0,00
	d. Mutasi Keluar	0,00	0,00
	e. Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00
	f. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
	g. Penilaian Kurang	0,00	0,00
	Saldo Akhir	33.206.579.253,52	28.779.831.794,52

- Penjelasan atas Mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:
- B.2.2.a Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.428.530.559,00 dan Rp2.636.147.129,91 merupakan realisasi belanja modal untuk memperoleh Peralatan dan Mesin pada TA 2022 dan 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru.
- B.2.2.b Hibah masuk pada Mutasi Tambah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0.00 dan Rp25.000.000,00. merupakan Hibah Masuk Peralatan dan Mesin dari Universitas Indonesia kepada RSUD Waru dengan Nomor Distributor .
- B.2.3.a Aset Extra Comptable per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.383.100,00 dan Rp798.539,46 merupakan nilai perolehan atas aset peralatan dan mesin yang tidak dapat dikapitalisasikan.Besaran nilai yang dapat dikapitalisasikan mengacu pada Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
B.3	Gedung dan Bangunan	31.919.334.000,00	31.698.730.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 15. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	31.698.730.000,00	31.698.730.000,00
2	Mutasi Tambah tahun berjalan		
	a. Realisasi Belanja Modal	62.580.000,00	69.600.000,00
	b. Hibah Masuk	0.00	0.00
	c. Mutasi Masuk	0.00	0.00
	d. Reklasifikasi Tambah	0.00	0.00
	e. Koreksi Pencatatan	162.624.000.00	0.00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan		
	a. Aset Ekstrakomptabel	0.00	0.00
	b. Hibah Keluar	0.00	0.00
	c. Mutasi Keluar	0.00	0.00
	d. Reklasifikasi Kurang	4.600.000,00	69.600.000,00
	e. Koreksi Pencatatan	0.00	0.00
	Saldo Akhir	31.919.334.000,00	31.698.730.000,00

Penjelasan atas mutasi tersebut sebagai berikut:

- B.3.2.a Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp62.580.000,00 dan Rp69.600.000,00 merupakan realisasi belanja modal untuk memperoleh Gedung dan Bangunan pada TA 2022 dan 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru.
- B.3.3.d Reklasifikasi Kurang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.600.000,00 dan Rp69.600.000,00 merupakan reklasifikasi keluar ke jalan, irigasi dan Jaringan TA 2022.
- B.3.2.e Koreksi pencatatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp162.624.000,00 merupakan utang belanja Rumah Sakit pada Gedung dan bangunan.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.234.508.000,00	1.234.508.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun mutasi Jalan. Irigasi dan Jaringan

32

per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 16. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	1.234.508.000,00	1.164.908.000,00
2	Mutasi Tambah tahun berjalan		······································
	a. Realisasi Belanja Modal	0,00	0,00
	b. Mutasi Masuk	0,00	0,00
	c. Reklasifikasi Tambah	0,00	69.600.000,00
	d. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan		
	a. Hibah Keluar	0,00	0,00
	b. Mutasi Keluar	0,00	0,00
	c. Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00
	d. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
	Saldo Akhir	1.234.508.000.00	1.234.508.000,00

Penjelasan atas mutasi tersebut sebagai berikut:

B.4.2.c Reklasifikasi Tambah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0.00 dan Rp69.600.000.00 merupakan Reklasifikasi yang berasal dari Gedung dan Bangunan TA 2022.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
B.5	Aset Tetap Lainnya	163.487.100.00	163.487.100.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. yang terdiri dari:

Tabel 17. Aset Tetap Lainnya

No	Urajan	31 Des 2022	31 Des 2021
	Craian	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Awal	163.487.100,00	163.487.100.00
2	Mutasi Tambah tahun berjalan		
	a. Realisasi Belanja Masuk	0,00	0,00
	b. Mutasi Masuk	0,00	0,00
	c. Reklasifikasi Tambah	0,00	0,00
	d. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan		
	a. Hibah Keluar	(0,00)	(0,00)
	b. Mutasi Keluar	(0,00)	(0,00)
	c Reklasifikasi Kurang	(0,00)	(0,00)
	d Koreksi Pencatatan	(0,00)	(0,00)
	Saldo Akhir	163.487.100.00	163.487.100.00

Penjelasan atas mutasi tersebut sebagai berikut :

B.5.2.c Reklasifikasi Tambah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 merupakan reklas masuk yang berasal dari Gedung dan Bangunan.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
B.7	Akumulasi Penyusutan	(32.048.051.678,00)	(26.425.367.577,00)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi Penyusutan Asset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kab. Pamekasan per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 18. Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.953.920.447,00	20.997.512.890,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.865.779.567,00	5.231.544.806,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan. Irigasi. dan Jaringan	228.351.664,00	196.309.881,00
	Jumlah	(32.048.051.678,00)	(26.425.367.577,00)

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
C.	Aset Lainnya	58.520.083,00	34.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 19. Aset Lainnya

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
C.5	Aset Tidak Berwujud	99.437.500,00	99.437.500,00
C.6	Aset Lain-lain	41.520.083,00	0,00
C.7	Akumulasi Amortisasi dan Penysutan	(82.437.500,00)	(65.437.500,00)
	Jumlah	58.520.083,00	34.000.000,00

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(R p)	(Rp)
C.5	Aset Tak Berwujud	99.437.500.00	99.437.500.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tak Berwujud pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021 adalah:

Tabel 20. Aset Tak Berwujud

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Saldo Awal	99.437.500,00	99.437.500.00
2	Mutasi Tambah tahun berjalan		
	a. Hibah Masuk	0,00	0,00
	b. Mutasi Masuk	0,00	0,00
	c. Reklasifikasi Tambah	0,00	0,00
	d. Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
3	Mutasi Kurang tahun berjalan		
	a. Mutasi Keluar	(0,00)	(0,00)
	b. Koreksi Pencatatan	(0,00)	(0,00)
	Saldo Akhir	99.437.500,00	99.437.500,00

				31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
C.7	Akumulasi Penyusutan	Amortisasi	dan	(82.437.500,00)	(65.437.500,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Akumulasi dan Amortisasi

No	Aset Lain-lain	31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Penyusutan Aset Tak Berwujud	(82.437.500,00)	(65.437.500,00)
2	Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
	Jumlah Penyusutan Aset Lain-lain	(82.437.500,00)	(65.437.500,00)

D. Kewajiban

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
D.1	Kewajiban Jangka Pendek	850.476.255,00	94.875.198,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Tabel 22. Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
D.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
D.1.4	Utang Belanja	850.476.255,00	0,00
D.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	94.875.198,00
	Jumlah	850.476.255,00	94.875.198,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp94.875.198,00 merupakan
 Utang barang dan jasa serta jasa pelayanan pada RSUD Waru. Untuk tahun per 31 Desember
 2022 Utang barang dan jasa serta jasa pelayanan di masukkan kedalam Utang Belanja
 sebesar Rp850.476.255,00 yang terdiri dari:

Tabel 23. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

	: and : = 0: : : 0: : aj. : an : 0: : ao: : = an : : j : a			
No	Uraian	31 Des 22	31 Des 21	
INO	Ulalali	(Rp)	(Rp)	
1	Utang Listrik. Telepon, Air, internet, surat kabar, dan transfusi darah	194.680.480,00	22.392.640,00	
2	UtangJasa Pelayanan RSUD Waru	493.271.775,00	72.482.558,00	
3	Utang atas Kontrak Pekerjaan yang di DPAL kan (Koreksi pencatatan atas bangunan yang fisiknya dan jasa konsultan sudah selesai tetapi belum dibayar)	162.524.000,00	0	
4	Penyesuaian atas utang jasa pelayanan RSUD waru	0	0	
	Jumlah	850.476.255,00	94.875.198,00	

Rincian Utang Jangka Pendek sebagai berikut

- c. Utang Jasa Pelayanan RSUD Waru sebesar Rp591.868.873,61, yang seharusnya sebesar Rp493.271.775,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp98.597.098,61.
- d. Utang atas kontrak pekerjaan yang di DPAL sebesar Rp162.624.000,00 yang seharusnya sebesar Rp162.524.000,00, sehingga terdapat selisih Rp100.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan pembuatan Canopy
 - (1) Konsultan perencana sebesar Rp2.370.000,00
 - (2) Konsultan Pengawasan sebesar Rp1.660.000,00
 - (3) Konstruksi sebesar Rp59.575.000,00

35

- 2) Perbaikan lantai keramik RSUD Waru sebesar Rp52.200.000,00, dengan rincian sebagai berikut
 - (1) Konsultan perencana sebesar Rp2.100.000,00
 - (2) Konsultan Pengawasan sebesar Rp2.100.000,00
 - (3) Konstruksi sebesar Rp48.000.000,00
- 3) Pengeboran air bersih sebesar Rp46.719.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Konsultan perencana sebesar Rp1.800.000,00
 - (2) Konsultan Pengawasan sebesar Rp1.163.000,00
 - (3) Konstruksi sebesar Rp43.756.000,00.

		31 Des 2022	31 Des 2021
		(Rp)	(Rp)
E.1	Ekuitas	38.880.619.227,09	37.476.487.089,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

5.3.3 Penjelasan Pos Laporan Operasional

A. Pendapatan LO

		TA 2022	TA 2021
		(R p)	(Rp)
A.1	Pendapatan Jasa		
	Layanan dari	4.062.122.808,08	1.754.804.804,00
	Masyarakat		

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021.

Tabel 24. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Layanan dari Mayarakat	4.062.122.808,08	1.754.804.804,00
3	Pendapatan Hibah	0,00	25.000.000,00
4	Pendapatan asli daerah lainnya	0,00	(10.522.500,00)
	Jumlah	4.062.122.808,08	1.754.804.804,00

		TA 2022	TA 2021
		(R p)	(Rp)
B.	Beban LO	17.410.202.255,51	14.958.043.761,92

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Tabel 25. Beban LO

No	Urajan	TA 2022	TA 2021
INO	Uraian	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pegawai	5.600.291.446,17	5,085,983,039.00
2	Beban Persediaan	2.485.741.515,90	1,427,657,857.46
3	Beban Jasa	3.417.692.592,44	2,447,082,326.00
4	Beban Pemeliharaan	219.731.000,00	138,349,180.00
5	Beban Perjalanan Dinas	40.678.500,00	45,684,901.00
6	Beban Penyusutan	5.639.684.101,00	5,812,487,919.00
7	Beban lain-lain	6.383.100,00	798,539.46
	Jumlah	17.460.553.201,56	14.958.043.761,92

B.1 Beban Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp5.600.291.446,17 dan Rp5.085.983.039,00 terdiri dari:

Tabel 26. Beban Pegawai

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.345.488.720,00	3.192.336.672,00
2	Gaji Pokok PPPK	259.425.600,00	240.895.200,00
3	Tunjangan Keluarga PNS/PPPK	326.651.034,00	314.538.342,00
4	Tunjangan Jabatan PNS	40.320.000,00	129.084.790,00
5	Tunjangan Fungsional PNS/PPPK	163.039.375,00	107.290.000,00
6	Tunjangan Fungsional Umum PNS/PPPK	128.775.625,00	155.750.000,00
7	Tunjangan Beras PNS/PPPK	228.702.360,00	232.316.118,00
8	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.365,00	0,00
9	Pembulatan Gaji PNS/PPPK	65.256,00	62.085,00
10	Iuran Jaminan Kesehatan PNS/PPPK	146.270.472,00	141.456.431,00
11	luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS/PPPK	7.416.109,00	7.214.142,00
12	Iuran Jaminan Kematiaan PNS/PPPK	22.248.728,00	21.642.966,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	17.100.000,00	154.583.131,00
14	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	55.500.000,00	0,00
15	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	208.701.317,00	0,00
17	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	355,121,324.17	385.213.162,00
	Jumlah	5.600.291.446,17	5.085.983.039,00

B.2 Beban Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp2.485.741.515,90 dan Rp1.427.657.857,46 terdiri dari:

Tabel 27. Beban Persediaan

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
NO		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.371.000,00	41.509.600,00
2	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	44.150.000,00	87.285.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.089.329.259,00	415.429.033,10
4	Beban Jasa Service	0,00	0,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.797.500,00	3.356.400,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.713.000,00	32.465.270,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	90.297.100,00	37.796.200,00
8	Beban perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.468.000,00	0,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan		
	untukKegiatan Kantor Lainnya	23.345.400,00	0,00
11	Beban Publikasi	0,00	0,00
12	Beban Peralatan Kesehatan Pakai Habis	0,00	291.552.574,00
13	Beban Obat-Obatan-Obat	669.369.472,36	419.521.773,36
14	Beban Makanan dan Minuman Rapat	28.025.000,00	4.600.000,00
15	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
16	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00

	17	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		
		Urusan Kesehatan	137.593.705,00	94.142.007,00
ĺ		Jumlah	2.485.741.515,90	1.427.657.857,46

B.3 Beban Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp3.417.692.592,44 dan Rp2.447.082.326,00 terdiri dari:

Tabel 28. Beban Jasa

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	0,00	105.000.000,00
	Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	105.000.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	29.400.000,00	24.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan	1 001 000 000 00	4 000 047 700 00
3	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.601.000.000,00	1.388.617.786,00
4	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.756.000,00	0,00
5	Beban Jasa Tenaga Administrasi	323.600.000,00	234.600.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	75.400.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	126.000.000,00	75.600.000,00
8	Beban Jasa Kalibrasi	60.102.000,00	42.300.000,00
9	Beban Jasa Pengolahan Sampah	110.488.950,00	65.757.900,00
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.483.594,00	14.521.150,00
11	Beban Tagihan Telepon	1.185.331,00	3.045.190,00
12	Beban Tagihan Listrik	273.617.400,00	265.166.200,00
13	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.950.000,00
14	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.901.280,00	24.901.662,00
15	Beban paket/pengiriman	0,00	0,00
16	Beban Jasa Perbaikan Peralatan Gedung/Kantor	0,00	0,00
17	Beban Jasa Publikasi	0,00	0,00
18	Beban Registrasi/Keanggotaan	5.140.000,00	5.640.000,00
19	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.250.000,00	0,00
20	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000,00	17.000.000,00
21	Beban Sewa Hotel	1.930.000,00	0,00
22	Beban Jasa Konsultansi Hukum	0,00	0,00
23	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00
24	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00
25	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	90.034.576,00	98.157.038,00
26	Jasa pelayanan bagi non ASN	236,747,549.44	0,00
	Jumlah	3.417.692.592,44	2.447.082.326,00

B.4 Beban Pemeliharaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp219.731.000,00 dan Rp138.349.180,00 terdiri dari:

Tabel 29. Beban Pemeliharaan

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Beban jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	0,00	0,00
2	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	51.371.000,00	0,00
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin	2.760.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.217.500,00	3.111.200,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.375.000,00	8.850.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	41.475.980,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	19.506.000,00	4.945.000,00

	Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		
10	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	38.449.500,00	34.800.000,00
	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	38.449.300,00	34.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	0.00	1.500.000,00
	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	0,00	1.500.000,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	96.000.000,00	0.00
	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	96.000.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan		
	Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan	0,00	19.800.000,00
	Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	47 422 000 00	22 867 000 00
	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	47.423.000,00	23.867.000,00
	Jumlah	219.731.000,00	138.349.180,00

B.5 Beban Perjalanan Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp40.678.500,00 dan Rp45.684.901,00terdiri dari:

Tabel 30. Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	61.583.800,00	0,00
2	Belanja kepesertaan	0,00	0,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	31.500.000,00	15.440.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.844.000,00	14.464.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.000.000,00	820.000,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.564.500,00	14.960.901,00
	Jumlah	40.678.500,00	45.684.901,00

Beban Penyusutan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp5.639.684.101,00 dan Rp5.812.487.919,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Beban Penyusutan

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
	Beban Penyusutan Aset Tetap:		
1	Beban Penyusutan Peralatan	4.956.407.557,00	5.130.735.955,00
2	Beban Penyusutan Bangunan	630.982.281,00	629.822.681,00
3	Beban Penyusutan Jalan	32.041.783,00	32.041.783,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya	17.000.000,00	19.887.500,00
	Jumlah	5.639.684.101,00	5.812.487.919,00

Beban Lain-lain pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru TA 2022 dan 2021 sebesar Rp6.383.100,00 dan Rp798.539,46 merupakan ekstrakomtabel.

		TA 2022	1A 2021
		(Rp)	(Rp)
C.	Surplus/Defisit LO	(13.398.430.393,48)	(12.870.475.220,92)

Jumlah tersebut merupakan selisih pengurangan antara Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa dengan Pos Luar Biasa dengan perhitungan sebagai berikut.

TI 4 2022

Tabel 32. Surplus/Defisit LO

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan –LO	4.062.122.808,08	1,744,282,304.00	
2	Beban	(17.460.553.201,56)	(14.958.043.761,92)	
3	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	318.286.237,00	
	Surplus/Defisit-LO	(13.398.430.393,48)	(12.870.475.220,92)	

TI A A A A A A A

5.3.4 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

TA 2022 TA 2021
(Rp) (Rp)
A. Ekuitas Awal 37.476.487.089,50 40.126.910.846,07

Jumlah ekuitas awal tahun 2022 tersebut merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2021 dan ekuitas awal tahun 2021 tersebut merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022.

TA 2022 TA 2021
(Rp) (Rp)

B. Surplus/Defisit LO (13.398.430.393,48) (12.870.475.220,92)

Jumlah tersebut merupakan Surplus/ Defisit LO selama periode 2022 dan 2021.

TA 2022 TA 2021
(Rp) (Rp)

C. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

14.653.514.286,41
10.220.051.464,35

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp. 14,653,514,286.41 dan Rp. 10,220,051,464.35 yang terdiri dari:

Tabel 33. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	
INO	Uididii	(Rp)	(Rp)	
1	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00	
2	Koreksi Saldo Awal Piutang	0.00	0.00	
3	Penyesuaian Penyisihan Piutang Tak tertagih	0.00	0.00	
4	Koreksi saldo awal investasi permanen-Penyertaan Modal	0.00	0.00	
5	Koreksi saldo awal Aset Tetap		0.00	
6	Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	0,00	(5.000.000,00)	
7	Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain	0.00	0.00	
8	Penyesuaian Penyusutan Aset Lain Lainnya	0.00	0.00	
9	Penyesuaian Amortisasi Aset Tak berwujud	0.00	0.00	
10	Koreksi Saldo Awal Hutang	0.00	0.00	
11	R/K PPKD	14.653.514.286,41	10.225.051.464,35	
	Jumlah	14.653.514.286,41	11.415.474.305,33	

Penyesuaian penyusutan Aset Tetap tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp(5.000.000,00) C.6 merupakan koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 34. Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap

5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jumlah	0.00	0,00 (5.000.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan	(32.048.051.678,00)	(26.425.367.577,00)
3	Penghapusan Aset Tetap	0	0
2	Beban Penyusutan	5.639.684.101,00	5.812.487.919,00
1	Akumulasi Penyusutan Tahun sebelumnya	26.425.367.577,00	20.627.767.158,00
No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)

TA 2022 TA 2021
(Rp) (Rp)

D. Kenaikan/Penurunan Ekuitas 1.255.083.892,93 (2.650.423.756,57)

40

Jumlahah tersebut merupakan Kenaikan/Penurunan Ekuitas yang berasal dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dan Penyesuaian Lain-lain dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 35. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
		(Rp)	(Rp)
1	Surplus/Defisit-LO	(13.398.430.393,48)	(12.870.475.220,92)
2	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	14.653.514.286,41	10.220.051.464,35
	Jumlah	1.255.083.892.93	(2.650.423.756.57)

 TA 2022
 TA 2021

 (Rp)
 (Rp)

 E. Ekuitas Akhir
 38.880.619.027,09
 37.476.487.089,50

Jumlah tersebut merupakan selisih Antara Ekuitas Awal dengan Kenaikan/Penurunan Ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 36. Ekuitas Akhir

No	Liroion	TA 2022	TA 2021
INO	Uraian	(Rp)	(Rp)
1	Ekuitas Awal	37.476.487.089,50	40.126.910.846,07
2	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	1.404.131.937,59	(2.650.423.756,57)
	Jumlah	38.880.619.027,09	37.476.487.089,50

5.5 Penutup

Berdasarkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1. Realisasi pendapatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.843.907.221,08 dari Anggaran sebesar Rp5.363.423.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.089.102.417,08 atau sebesar 20,41 % dari Anggaran;
- Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 terjadi penghematan sebesar 8% yaitu dari anggaran sebesar Rp16.675.826.874,00 terealisasi sebesar Rp15,335,294,550.41 atau terjadi penghematan belanja sebesar Rp1.340.616.423,59; dan
- 3. Dalam Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RSUD Waru Kabupaten Pamekasan terjadi defisit sebesar Rp11.491.387.329,33.

Pamekasan, 27 Maret 2023 DIREKTUR RSUD WARU KABUPATEN PAMEKASAN

dr. NANANG SUYANTO, M.Si

Pembina IVa

T ACCOUNT JURNAL KOREKSI & REKLASIFIKASI Laporan Keuangan RSUD Waru Pamekasan Tahun Anggaran 2022

	Tahun Anggaran 2022 Dalam Rupial						
No	No Jurnal	Keterangan		Kode Rekening	Debet	Kredit	Setuji
1	2	3			4	5	6
1	PJE#01	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan ASN		2.1.06.01.03.0050	98.597.098,61		✓
	PJE#01	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan ASN		8.1.01.03.06.0001		98.597.098,61	✓
		Koreksi atas lebih catat Utang Jasa Pelayanan Kesehatan ASN					
		Saldo Utang Jaspel LK 5	91.868.873,61				
			93.271.775.00				
	Ì		98.597.098,61				
		Cononi	00.007.000,01				
2	PJE#02	Utang Beban Yang masih harus dibayar			100.000.00		✓
	PJE#02	Beban pihak ketiga				100.000,00	✓
		Koreksi atas lebuh catat Utang jangka pendek					
		V, V ,					
		Saldo Utang LK 1	62.624.000,00				
		Saldo Utang yang seharusnya 1	62.524.000,00				
		Selisih	100.000,00				
3		Kas di Bendahara Penerimaan			2.084.521,00		√
	PJE#03	Kas di BLUD				2.084.521,00	✓
		Reklasifikasi Kas di BLUD ke Kas di Bendahara					
		Penerimaanper 31 Desember 2022					
4	PJE#03	Persediaan Obat-Obatan			50.350.946,05		√
	PJE#03	Beban Persediaan				50.350.946,05	✓
		Koreksi atas kurang catat penyajian Persediaan Obat-					
		obatan per 31 Desember 2022					
		Persediaan Obat-obatan Gudang Farmasi	384.272.186				
		Persediaan Obat-obatan Depo Farmasi	93.589.361				
		Jumlah persediaan obat-obatan	477.861.547				
		Persediaan sesuai LK	427.510.601				
		Selisih	50.350.946				
5	PJE#03	Aset Lain-lain			41.520.083,00		√
	PJE#03	Persediaan Obat-obatan			. ,,,,,,,	41.520.083,00	✓
		Reklasifikasi Obat Kedaluwarsa ke Aset Lain-lain				,	
		Jumlah			192.652.648.66	192.652.648.66	

Disetujui Oleh: Direktur, Surabaya, April 2023 Diajukan Oleh: Tim Pemeriksa,

dr. NANANG SUYANTO, M.Si NIP : 19691105 200212 1 002 Wawan Hermansyah